



Pengadaan Gerobak Sampah Semakin Mendesak

■ Penutupan TPS Kecil di Kota Yogyakarta Timbulkan Persoalan Baru

YOGYA, TRIBUN - Penutupan sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) kecil di wilayah Kota Yogyakarta justru menimbulkan persoalan baru. Sejumlah warga kesulitan membuang sampah karena belum adanya solusi konkret pengganti TPS yang ditutup, seperti penyediaan gerobak sampah terorganisasi.

Mega, warga RW 10 Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, mengungkapkan sudah beberapa minggu terakhir mengalami kesulitan membuang sampah rumah tangga. Hal ini terjadi setelah TPS di RW 13 ditutup sekitar dua minggu lalu, disusul penutupan TPS di RW 07 dalam dua hari terakhir.

"Kami bingung mau buang sampah ke mana lagi karena TPS di RT pun sudah ditutup beberapa bulan

PENGADAAN MASIH JULI-AGUSTUS

- Sejumlah warga mengaku kesulitan membuang sampah usai TPS kecil di Kota Yoga ditutup.
- Hal ini semakin memberatkan warga karena tidak ada kejelasan mengenai gerobak sampah.
- Pemkot Yoga memanggil para lurah terkait mekanisme pengadaan gerobak sampah.
- Pengadaan dalam skala besar direncanakan pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.

lalu," ujar Mega, Kamis (10/4).

Menurut Mega, tidak ada kejelasan dari pemerintah di tingkat RT, RW, maupun kalurahan mengenai keberadaan gerobak sampah yang bisa dimanfaatkan warga. Padahal, setiap hari ada sampah rumah tangga yang tetap dihasilkan warga, dan tidak semua sampah bisa dikelola melalui bank

sampah yang dimiliki RW.

"Plastik dan kertas bisa kami olah, tapi sampah residu seperti sisa makanan dan pembalut tidak bisa. Kami bingung harus membuang ke mana kalau tidak ada gerobak sampah setelah TPS ditutup," ujarnya.

Hal senada disampaikan Inah, warga lain di Kampung Jogoyudan. Ia mengaku kebingungan

setelah TPS kecil di RW 07, satu-satunya tempat pembuangan yang bisa diakses warga ikut ditutup pada Rabu (9/4). "Warga tidak tahu apakah ada gerobak untuk mengangkut sampah. Kami mau kok bayar, asal ada yang mengambil," ungkap Inah.

Keresahan juga dirasakan Muslim, warga Kemantren Mantrijeron. Ia mengkhawatirkan jika pengelolaan sampah diserahkan ke penggerobak tanpa regulasi yang jelas, akan terjadi praktik 'nuthuk' atau penarikan biaya sewenang-wenang. "Tidak semua warga mampu membayar biaya pengambilan sampah. Kalau tanpa aturan, bisa saja tarifnya tidak wajar," kata Muslim.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa penutupan TPS kecil merupakan bagian dari

upaya revitalisasi depo-depo sampah yang mengalami kerusakan. Menurut dia, sejumlah depo saat ini sedang dibersihkan, diperbaiki, dan dilengkapi dengan saluran air agar bisa difungsikan kembali.

"Depo-depo itu nantinya bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Untuk warga yang belum siap membuang langsung ke depo besar, bisa tetap memakai TPS kecil, tapi melalui sistem gerobak, bukan individu," ujar Hasto.

Ia mengakui bahwa persoalan utama saat ini adalah kurangnya informasi di tingkat kalurahan dan RW di Kota Yogyakarta mengenai mekanisme pengadaan gerobak sampah. Pemerintah Kota telah memanggil para lurah dan memberi penjelasan agar dapat menyosialisasikan sistem baru ini ke warga.

"Kami tahu banyak warga belum

tau harus minta tolong ke siapa. Bahkan lurah pun belum tahu. Maka dari itu kami langsung menindaklanjuti dengan memanggil para lurah," kata Hasto.

Namun demikian, Pemkot Yogyakarta belum dapat segera menyediakan gerobak sampah secara masif. Pengadaan dalam skala besar direncanakan pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Untuk sementara, solusi darurat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diterapkan, seperti bantuan tiga gerobak dari PDAM.

"Kalau warga mau swadaya dulu, boleh saja, apalagi kalau situasinya mendesak. Tapi untuk pengadaan resmi, nanti akan kami anggarkan melalui kalurahan pada pertengahan tahun ini," tambah Hasto. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005